



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 811381

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 9.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m²/230 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m²/132 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m²/85 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HADIAH Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/54 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/48 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/46 m² di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 418 m²/100 m² di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/133 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 118.500.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. LAINNYA, SELIS SEPEDA LISTRIK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 41.200.000



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 215.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 9.374.700.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 1.730.248.744 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 7.644.451.256 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.